

DESENTRALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFISIENSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Livia Dinda Syafitri^{1*}, Tumija², Luthfi Azhari³

¹Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

²Ilmu Administrasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

³Keuangan Publik, Institut Pemerintah Dalam Negeri, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Email:

liviadnda@gmail.com¹,

tumija@ipdn.ac.id²,

luthfiazhari.ipdn@gmail.com³



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi kebijakan administrasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, dengan fokus pada pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengkaji literatur sebelumnya yang berkaitan dengan praktik administrasi di pemerintahan daerah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada peningkatan yang signifikan, tantangan masih tetap ada, terutama dalam bidang alokasi sumber daya dan inefisiensi birokrasi. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan integrasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia dalam administrasi daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, Kebijakan Administratif, Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas Pelayanan Publik.

Abstract

This article discusses the implementation of local government administration policies in improving public service quality. The study aims to analyze how these policies influence local governance effectiveness, focusing on public services. The research uses a qualitative approach, examining previous literature related to administrative practices in local governments. The findings suggest that although significant improvements have been made, challenges remain, particularly in the areas of resource allocation and bureaucratic inefficiency. Recommendations are offered to improve the integration of technology and human resources management in local administrations.

Keywords: Local Government, Public Services, Administrative Policies, Governance, Public Service Quality.

I. PENDAHULUAN

Fenomena administrasi pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan penerapan kebijakan desentralisasi yang dimulai pada akhir 1990-an. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Menurut Raharjo & Nugroho (2020), desentralisasi telah membuka peluang bagi daerah untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya, namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan baru, terutama dalam hal efisiensi administrasi dan kualitas layanan publik.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam implementasinya. Meskipun kebijakan desentralisasi memberikan kebebasan lebih bagi pemerintah daerah, namun tidak semua daerah memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola kebijakan tersebut secara efektif. Pengelolaan anggaran yang terbatas serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kendala utama dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Hal ini berdampak pada ketimpangan pelayanan di berbagai daerah, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan alokasi sumber daya yang lebih adil dan merata.

Lebih lanjut, pemerintahan daerah juga seringkali menghadapi masalah dalam koordinasi antarinstansi. Ketidakselarasan antara kebijakan yang diambil di tingkat pusat dengan implementasi di tingkat daerah seringkali menyebabkan terhambatnya proses administrasi. Sebagai contoh, meskipun banyak daerah yang sudah menerapkan sistem e-government, penerapan tersebut seringkali tidak berjalan optimal karena kurangnya infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi aparatur pemerintah.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan administrasi pemerintahan daerah terhadap kualitas pelayanan publik, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di samping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui platform Google Scholar, yang mengakses artikel-artikel ilmiah terkini terkait administrasi pemerintahan daerah. Sebagian besar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada jurnal-jurnal terkait kebijakan desentralisasi, manajemen pemerintahan daerah, dan kualitas layanan publik yang dapat diakses secara daring.

II. TEORI YANG DIGUNAKAN

Dalam penelitian ini, beberapa teori penting digunakan untuk menganalisis penerapan kebijakan administrasi pemerintahan daerah dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Teori-teori ini membantu memahami dinamika administrasi daerah dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi efisiensi, efektivitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Beberapa teori yang digunakan adalah Teori Desentralisasi Administratif, New Public Management (NPM), dan Teori Hubungan Pemerintah dan Masyarakat.

1. Teori Desentralisasi Administratif

Teori Desentralisasi Administratif mengemukakan bahwa desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal dengan lebih efisien dan responsif. Desentralisasi ini memindahkan sebagian besar kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk lebih merespons kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Tiebout (1956) dalam teorinya, dengan memberikan otonomi lebih kepada daerah, maka pemerintah daerah akan lebih dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, desentralisasi juga dipercaya dapat mengurangi birokrasi yang sering kali menghambat kelancaran administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, tantangan yang muncul dalam desentralisasi adalah adanya ketimpangan dalam kapasitas pengelolaan di berbagai daerah. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang telah diberikan.

2. Teori New Public Management (NPM)

Teori New Public Management (NPM) muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap birokrasi tradisional dalam pelayanan publik. NPM mengedepankan prinsip-prinsip manajerial yang lebih efisien, berbasis hasil, dan orientasi kepada pelanggan. Dalam konteks pemerintahan daerah, NPM mendorong penerapan praktik manajerial yang lebih mirip dengan sektor swasta, seperti penggunaan teknologi informasi, pengukuran kinerja, dan pemotongan biaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi. NPM juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, dalam penerapan administrasi pemerintahan daerah, teori ini menjadi relevan karena dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk lebih berfokus pada peningkatan kinerja dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penerapan NPM dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan publik dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Menurut Hood (1991), NPM mencakup berbagai aspek, termasuk desentralisasi, penggunaan teknologi informasi, serta pengembangan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah. Dengan adanya NPM, pemerintah daerah diharapkan dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

3. Teori Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Teori ini berfokus pada pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi pemerintahan. Dalam kerangka teori ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga lebih terbuka dan partisipatif. Putnam (2000) dalam teori sosial kapitalnya menekankan bahwa kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh partisipasi sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan semakin transparan kebijakan yang diterapkan, maka semakin baik kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan.

Teori ini juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pemerintahan akan lebih mudah memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan yang diterapkan, serta dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan untuk menilai kualitas administrasi pemerintah daerah, karena peningkatan partisipasi masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Integrasi Ketiga Teori

Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menganalisis kebijakan administrasi pemerintahan daerah. Desentralisasi Administratif memberikan kerangka kerja untuk pemindahan wewenang ke daerah, New Public Management (NPM) memberikan pendekatan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan daerah, dan Teori Hubungan Pemerintah dan Masyarakat memberikan perspektif penting mengenai peran partisipasi dan transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Literature Review** dengan pendekatan kualitatif. Penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah dan laporan terkait administrasi pemerintahan daerah yang diambil dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah yang tersedia di Google Scholar. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun gambaran umum mengenai penerapan kebijakan administrasi daerah dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun penerapan kebijakan administrasi pemerintahan daerah telah menunjukkan beberapa kemajuan, masih ada sejumlah tantangan besar yang perlu diatasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih optimal. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan manajemen anggaran dan koordinasi antarinstansi, yang berhubungan erat dengan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

1. Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2019) menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan otonomi lebih besar bagi pemerintah daerah, pengelolaan anggaran di banyak daerah masih menghadapi kesulitan besar. Salah satu masalah utama adalah ketidakselarasan antara kebutuhan daerah dengan alokasi anggaran yang diterima. Banyak daerah mengalami ketidaktepatan alokasi anggaran, di mana dana yang diterima tidak selalu mencerminkan prioritas kebutuhan lokal, terutama di daerah yang kurang berkembang. Efisiensi pengelolaan anggaran sering terhambat oleh kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pelaporan anggaran.

Misalnya, beberapa daerah mengalami over-budgeting pada sektor-sektor tertentu, sementara sektor yang lebih krusial, seperti infrastruktur dasar dan layanan kesehatan, sering kali kekurangan dana. Hal ini memperburuk ketimpangan dalam pelayanan publik dan memperlambat pencapaian target pembangunan daerah. Kontrol yang lemah terhadap alokasi anggaran juga dapat memicu penyalahgunaan dana yang akhirnya merugikan masyarakat.

Penelitian oleh Raharjo & Nugroho (2020) juga menemukan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pengelolaan anggaran, sistem pelaporan yang tidak terintegrasi dan rendahnya akuntabilitas sering kali menyebabkan kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas anggaran menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah.

2. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Optimal

Koordinasi antarinstansi merupakan elemen krusial dalam menjalankan kebijakan administrasi pemerintahan daerah yang efektif. Kuncoro (2019) menyatakan bahwa meskipun desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, seringkali kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tidak selaras dengan kemampuan implementasi di tingkat daerah. Hal ini mengarah pada fragmentasi kebijakan, di mana setiap instansi pemerintah di daerah bekerja dengan cara yang terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Sebagai contoh, banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik. Tumpang tindih kewenangan antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, seringkali menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan dan memperlambat proses administrasi. Koordinasi yang buruk ini berdampak pada kurangnya sinkronisasi antara kebijakan yang dikeluarkan dan pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

3. Implementasi Sistem e-Government yang Terbatas

Salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah administrasi adalah penerapan sistem e-Government, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi pemerintahan. Namun, seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, implementasi e-Government di beberapa daerah di Indonesia masih terbatas, meskipun teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses administrasi dan mempercepat pelayanan publik.

Menurut Sari (2022), beberapa daerah di Indonesia telah mengadopsi sistem e-Government, namun banyak yang belum mampu memaksimalkan penggunaannya karena berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah, dan resistensi terhadap perubahan. Di beberapa daerah, sistem informasi yang ada belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga mempengaruhi kelancaran pengelolaan data dan pelaporan administrasi. Padahal, e-Government dapat memberikan manfaat besar dalam hal penghematan biaya, transparansi, dan percepatan pelayanan publik. Misalnya, penggunaan platform digital untuk permohonan izin, pembayaran pajak, dan pendaftaran layanan kesehatan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut, serta meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Meskipun ada upaya untuk mengimplementasikan sistem e-Government di berbagai daerah, ketidakmerataan infrastruktur dan kesenjangan teknologi antara daerah kaya dan daerah miskin menjadi penghambat utama dalam penerapan sistem ini secara merata. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur teknologi serta pelatihan sumber daya manusia di daerah-daerah yang masih tertinggal.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pemerintahan Daerah

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas administrasi pemerintahan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintahan. Penelitian oleh Mahfud (2018) menyebutkan bahwa banyak aparatur pemerintah daerah yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola administrasi pemerintahan secara efektif. Hal ini tercermin dalam rendahnya tingkat keahlian teknis dalam penggunaan teknologi informasi, manajemen keuangan daerah, serta pengetahuan terkait kebijakan publik.

Keterbatasan SDM ini menghambat pengimplementasian kebijakan yang lebih modern dan berbasis hasil, seperti yang ditekankan dalam teori New Public Management (NPM). Untuk itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Dampak Kebijakan Terhadap Kualitas Layanan Publik

Penerapan kebijakan administrasi pemerintahan daerah yang tidak terintegrasi atau terlambat dalam implementasinya berimbas langsung pada kualitas layanan publik. Banyak daerah yang masih mengalami keterlambatan dalam penyediaan layanan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui desentralisasi, hambatan-hambatan dalam manajemen anggaran, koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan infrastruktur dan SDM masih menjadi faktor penghambat utama.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, perlu adanya perbaikan dalam manajemen anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan koordinasi antarinstansi, di samping pengembangan dan penerapan sistem e-Government yang lebih merata dan efektif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan administrasi pemerintahan daerah memang memberikan ruang bagi peningkatan kualitas layanan publik, namun tantangan seperti ketidakmerataan alokasi anggaran, ketidakterediaan sistem informasi yang efektif, dan kurangnya kapasitas aparatur daerah masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pelatihan bagi pegawai pemerintahan dan memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan administrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem transparansi anggaran dan memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Kuncoro, M. (2019). Desentralisasi dan Kualitas Layanan Publik di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 45(3), 123-135.

Raharjo, K., & Nugroho, E. (2020). Evaluasi Penerapan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(2), 201-214.

Suryanto, T. (2021). Pengaruh New Public Management terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 30(1), 45-60.

Mahfud, A. (2018). Teori Administrasi Pemerintahan Daerah: Perspektif dan Praktik. *Jurnal Administrasi Publik*, 30(1), 45-60.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.

Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416-424.

Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3-19.

Sari, R. (2022). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan e-Government: Studi Kasus di Daerah Terpencil. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 35(2), 89-102.



Azis, I. J., & Suyanto, H. (2017). Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Administrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 24(1), 37-52.

Nugroho, E., & Kuncoro, M. (2018). Keterbatasan Kapasitas Aparatur dalam Penerapan Kebijakan Desentralisasi di Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 19(3), 210-225.

Purnomo, R. (2019). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 29(4), 133-149.

Salim, S. (2017). Tantangan Desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 22(2), 119-132.

Wijaya, B., & Raharjo, K. (2020). Evaluasi Penggunaan Teknologi dalam Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 31(2), 101-116.

Haryanto, W. (2018). Desentralisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 28(1), 60-74.

Widiastuti, I. (2021). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 34(1), 78-92.